TUGAS DAN FUNGSI SMA NEGERI 112 JAKARTA

SEBAGAI BADAN PUBLIK

A. TUGAS SMAN 112 JAKARTA SEBAGAI BADAN PUBLIK

Sebagai satuan pendidikan negeri, **SMAN 112 Jakarta** termasuk dalam kategori **Badan Publik** yang dibiayai dengan anggaran negara atau daerah, sehingga memiliki tugas dan kewajiban terkait pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik.

1. Tugas Umum

- Menyelenggarakan pendidikan menengah atas sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
- 2. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3. Melaksanakan pembinaan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta berwawasan kebangsaan;
- 4. Menyusun dan melaksanakan program kerja sekolah berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- 5. Mengelola sarana, prasarana, serta sumber daya manusia secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

2. Tugas sebagai Badan Publik

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan turunannya, SMAN 112 Jakarta memiliki tugas:

1. Menyediakan Informasi Publik

- a) Informasi profil sekolah (visi, misi, tujuan, struktur organisasi).
- b) Informasi program/kegiatan sekolah.
- c) Informasi anggaran sekolah (RKAS, BOS, BOP, dan dana lainnya).
- d) Informasi tata tertib, kurikulum, serta layanan akademik.
- e) Informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

2. Menyediakan Layanan Informasi Publik

- a) Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekolah.
- b) Menyediakan sarana permohonan informasi (langsung, surat, website, email, dll).

c) Menyediakan daftar informasi publik (DIP) yang mudah diakses masyarakat.

3. Menjamin Keterbukaan dan Akuntabilitas

- a) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- b) Menyediakan laporan tahunan sekolah.
- c) Menyediakan informasi tentang kerja sama dengan pihak lain.

4. Melindungi Informasi yang Dikecualikan

- a) Menjaga kerahasiaan data pribadi peserta didik dan tenaga pendidik.
- b) Menjaga dokumen yang bersifat internal/rahasia sesuai ketentuan hukum.

B. FUNGSI SMAN 112 JAKARTA SEBAGAI BADAN PUBLIK

Sebagai salah satu satuan pendidikan negeri, SMAN 112 Jakarta berfungsi sebagai badan publik yang dibiayai dengan APBN/APBD, sehingga memiliki fungsi:

1. Fungsi Pendidikan

- a) Menyelenggarakan pendidikan menengah atas untuk membentuk peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.
- b) Melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai standar nasional dan kebijakan pemerintah.
- c) Menjadi pusat pembelajaran, pembinaan, dan pengembangan potensi peserta didik.

2. Fungsi Sosial

- a) Memberikan layanan pendidikan yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
- b) Menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di wilayah Jakarta dan Indonesia.
- c) Menjadi wadah interaksi sosial, budaya, dan kebangsaan di lingkungan sekolah.

3. Fungsi Administratif

- a) Mengelola dana pendidikan (BOS, BOP, dan sumber lainnya) secara transparan, efektif, dan akuntabel.
- b) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

c) Menyediakan data, dokumen, dan laporan yang wajib diumumkan kepada publik.

4. Fungsi Informasi Publik

- a) Menjadi sumber informasi resmi terkait penyelenggaraan pendidikan menengah negeri.
- b) Menyediakan informasi publik, seperti profil sekolah, tata tertib, kurikulum, program kerja, serta laporan keuangan.
- c) Menyelenggarakan pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekolah.
- d) Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan, khususnya data pribadi peserta didik dan pendidik.

5. Fungsi Akuntabilitas dan Transparansi

- a) Menjamin keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan hukum.
- b) Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
- c) Menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.